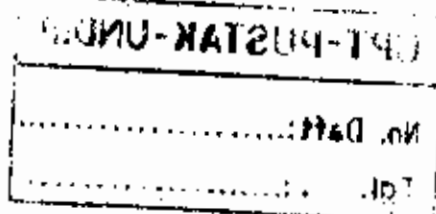


B-9

PENETAPAN SYARIAH ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

MULYO PUTRO, SI,



Makalah disajikan dalam diskusi bagian Dasar-Dasar
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, bulan Desember 2000.

PENERAPAN SYARIAH ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

ABSTRAK

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang diciptakan untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Efektifitas hukum di tengah masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan, penegakkan oleh aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara stimulan dalam rangka pembangunan hukum nasional demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang eksis di tengah masyarakat harus memiliki jiwa, nilai-nilai dan perasaan dan pandangan hukum masyarakat tersebut.

Kata kunci : Hukum dan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sampai sekarang mempunyai dampak yang luas dalam berbagai bidang kehidupan di tanah air. Salah satunya adalah krisis hukum, yang diawali oleh para birokrat yang menodai citra hukum kita. Ironisnya, sebagian masyarakat meniru atau bertindak sebagai mana para pemimpinnya. Setelah suara reformasi didengungkan dengan harapan membawa kehidupan yang cerah dalam bidang hukum. Namun fenomena maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme menambah ke segala bidang, perbuatan main hakim sendiri, pelanggaran HAM mengindikasikan betapa lemahnya penegakkan hukum di negeri ini.

Fenomena terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dapat dijadikan tolak ukur sampai sejauh mana eksistensi hukum di Indonesia. Yang jelas saat ini masyarakat semakin pandai dan sadar bahwa mereka tidak mau dibodohi lagi oleh penjajah pribumi (birokrat) melalui bidang hukum yang sloganisir dan tidak jarang dipolitisir. Disatu pihak kesadaran hukum masyarakat

terutama era orde baru secara lahiriah taat dan patuh menjalankan hukum yang terkesan "angker" lewat pamor sang penguasa. Dipihak lain, penguasa menerapkan pendekatan militeristik sehingga berhasil meminimalisir oknum-oknum tingkat bawah bahkan massa terhadap pelanggaran hukum. Kendatipun demikian, pelanggaran hukum ditingkat elit begitu marak diberitakan lewat media massa sehingga terjadi ketidak seimbangan (unbalancing) dan kesenjangan (gap) antar kesadaran pemerintah dan masyarakat. Kaitannya dengan hal itu, ketidakadilan dan kepastian hukum yang dirasakan minim bahkan tidak ada sehingga menimbulkan berbagai macam ekspresi ketidakpuasan baik secara individual maupun kolektif untuk menentang diskriminasi, kemunafikan dan ketidakadilan yang ujung-ujungnya mengarah pada isu dissintegrasikan bangsa.

Sehubungan dengan kondisi hukum di Indonesia yang suram dan tidak berdaya muncul ide sebagian masyarakat untuk memberlakukan syari'at Islam sebagai alternatif mengisi pembangunan hukum. Idealisme semacam itu berangkat dari realita bahwa masyarakat Indonesia delapan puluh persen adalah beragama Islam dan syari'at Islam merupakan pedoman hidup yang sederhana dan lengkap bagi umat Islam sehingga kesadaran hukum masyarakat bisa tumbuh dari bawah maupun dari atas (penguasa). Akan tetapi idealisme semacam itu bertabrakan dengan kondisi negara Indonesia yang memang sejak awal berdirinya berideologi Pancasila dengan komposisi masyarakat yang plural. Dan tidak kalah pentingnya, pembangunan hukum bukanlah pekerjaan yang mudah karena harus memperhatikan dan mempertimbangkan struktur, kultur, dan visi serta misi dari hukum yang akan diterapkan tersebut. Itu merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk dicarikan solusinya. Tetapi pemberlakuan syari'at Islam juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebagai upaya alternatif pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara mentransformasikan syari'at Islam yang universal itu kedalam tata hukum nasional yang notabene bersumber dari Pancasila dan UUD 1945?

B. PEMBAHASAN

1. URGENSI REFORMASI HUKUM

Dalam perspektif psikologi, hukum merupakan tata (orde) yang dapat menjembatani antara tendensi egois dan tendensi sosial. Semakin kompleks suatu masyarakat dibutuhkan pula hukum yang handal untuk menciptakan sistem masyarakat yang adil dan damai. Dewasa ini dikehendaki reformasi hukum di Indonesia yang disebabkan oleh beberapahal. Pertama dan merupakan yang terpenting adalah adanya perasaan yang meluas bahwa hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Mestinya hukum itu mendatangkan keadilan dan keteraturan, tetapi kenyataannya tidak. Jadi konteksnya adalah praktik hukum. Apabila kita mengikuti dan menelaah berita-berita di media massa misalnya, dapat kita catat sejumlah (tidak kecil !) data- putusan-putusan pengadilan yang memengkan pemerintah didalam sengketa "pemerintah versus rakyat".

Yang kedua adalah pada paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktek jurisprudence kita. Paradigma positifisme yang selama ini menjadi "kaca mata" kita dalam membaca hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah hukum saat ini. Akibatnya, kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula (legalist fallacy)².

Setidaknya faktor-faktor itulah yang mewarnai dunia hukum di Indonesia, yang memarginalkan *das sein-das sollen* baik ditingkat struktural maupun infrastrukturnya sehingga hukum benar-benar kehilangan pesonanya sebagai institusi keadilan. Oleh karena itu, urgen dilakukan reformasi di bidang hukum secara total, baik pada peraturanperundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata sejarah perkembangan hukum di Indonesia, yang mana paradigma positivisme masuk lewat kolonisasi Belanda yang mendominasi kajian hukum oleh para academic jurist dan profesional dalam menginterpretasikan hukum. Konsekuensi logis

¹ Artikel Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Keluasan Reformasi Hukum* di ambil dari buku menuju Indonesia baru, ed: Muza Kazhim, Pustaka Hidayah, 1998, hlm 203

dari adanya corak paradigma positivisme tersebut. Mau tidak mau dikembangkan dan di aplikasikan secara absolut dalam memandang atau membaca realitas. Inilah wacana yang belakangan sangat populer yang dilontarkan dan diserukan oleh para pihak yang proaktif menegakkan kembali supremasi hukum atau the rule of law. Artinya hukum harus kembali keposisinya yang netral dan otonom yang tidak lagi dikooptasi oleh pemegang kekuasaan negara yang selama rezim orde baru dianggap sebagai biang keroknya.

Paradigma memiliki kedudukan paling sentral dalam ilmu pengetahuan². Kalau kita mengacu kepada teori revolusi pengetahuan Thomas Khun, menunjukkan bahwa paradigma yang digunakan dalam studi hukum disini, yakni paradigma positifisme tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh khun sebagai "anomaly". Keadaan ini menjelaskan mengapa tidak muncul School (aliran) baru yang memberi paradigma yang lain pada studi hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran roberto M Unger untuk mengupayakan rekonstruksi terhadap wacana atau konsepsi hukum dan praktek politik liberal⁴.

2. POTENSI PEMBUDAYAAN SYARI'AT ISLAM : SUATU PENDEKATAN BARU

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum yang kita miliki sekarang adalah hukum warisan kolonial Belanda. Sebagai dampak kolonisasi yang waktu itu bangsa Indonesia belum memiliki tatanan hukum nasional (kodifikasi hukum). Realitas tersebut dibenarkan oleh UUD 1945 pasal II Peraturan Peralihan. Jujur saja, hukum positif yang sebagian besar masih eksis tidak bersumber dari pandangan dan jiwa bangsa Indonesia. Ironisnya, fakta hukum material yang antagonis tersebut seakan dipaksakan aplikasinya oleh penguasa oportunis yang akibatnya hukum tidak lagi berfungsi menegakkan keadilan dan kedamaian tapi menguntungkan satu

² Artikel Ifdhal Kasim, *Membebaskan Hukum*, Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis, Insist Press, 2000, hlm 3

³ Ifdhal Kasim, op. Cit, hlm 5

pihak saja. Maka wajar timbul hipotesis untuk menciptakan suatu sistem hukum yang benar-benar sesuai dengan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Itulah komitmen kita semua (bangsa Indonesia) sebagai satu-satunya jalan yang mungkin logis dan representatif untuk mengakhiri nostalgia hukum positif tersebut.

Untuk mencari solusi atas problem diatas memang sulit karena ada korelasinya dengan struktur, kultur dan visi serta misi hukum yang harus dicapai. Akan tetapi, kita bisa mengangkat syari'at Islam untuk diposisikan sebagai pioneer dalam upaya pembangunan hukum nasional. Eksistensi syari'at Islam di Indonesia memiliki dua potensi yaitu potensi internal dan eksternal; yakni⁵:

1. Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, tetap membuka adanya kemungkinan penyusupan dan penerimaan hukum agama kedalam hukum nasional. Hal ini tampak terlihat pada sila pertama Pancasila :Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi:

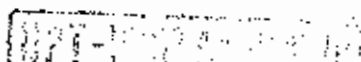
- 1 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

2. Potensi Penduduk Indonesia

Jumlah Penduduk Indonesia dewasa ini adalah 200 juta lebih, 85 % diantaranya beragama Islam. Secara kuantitatif, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan tentunya setiap kebijaksanaan harus melibatkan para pengambil keputusan muslim, baik di pusat maupun di daerah.

⁴ Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, EL.SAM, 1999, Idm. XXII

⁵ Disarikan dari artikel Prof. Dr. Umar Shihab, *Strategi Pembangunan Hukum Nasional Visi Syari'at Islam*, Pelita, 10 Oktober 2000.



Dengan kenyataan itu, sangat riskan rasanya jika suatu produk peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at Islam, sebab seperti yang telah dijelaskan pada bagian lalu bahwa suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi dan jiwa masyarakat, tidak akan mungkin berlaku efektif dan hanya menimbulkan kepatuhan semu saja.

3. Potensi Lembaga-lembaga Keislaman

Suatu hal yang memberi arti positif dalam upaya pembudayaan syari'at Islam adalah banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang dimiliki oleh umat Islam, baik yang formal maupun non formal. Lembaga-lembaga tersebut meskipun jenis, bentuk dan tugasnya berbeda, namun semuanya dapat digunakan sebagai wadah perjuangan dalam pembudayaan syari'at Islam menuju kemantapan hukum nasional. Adapun lembaga-lembaga keislaman yang dimaksud antara lain : 1). Lembaga Peradilan Agama; 2). lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3). Lembaga Majelis Dakwah Indonesia (MDI); 4). Lembaga Pendidikan Agama; 5) Lembaga sosial keagamaan dan sebagainya.

Lembaga-lembaga keislaman itu, disamping digunakan sebagai sarana pengembangan kaidah-kaidah Islam bagi masyarakat, juga digunakan sebagai wadah atau alat pengawasan sejauhmana syari'at Islam itu berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

4. Kaidah-kaidah Islam yang Universal

Dalam kaitannya sebagai pedoman yang mengatur aktifitas hidup manusia dimuka bumi ini, syari'at Islam tentunya memiliki sistem tata hukum yang modern berupa pembagian hukum-hukumnya ke dalam lapangan-lapangan hukum tertentu. Pembagian yang dimaksud adalah :

- a. Al-qanun al-khash (hukum privat) yang meliputi : (1) Muammalah (hukum perdata), (2) Al-tijarah (hukum dagang), (3) al-murafa'ah (hukum acara), (4) al-dauliy al-khash (hukum privat Internasional)

- b. Al-qanun al-dam (hukum publik), yang meliputi : (1) Jinayah (hukum pidana), (2) aal siyasa al sya'riyyah (hukum tata negara), (3) al idari (hukum administrasi negara), (4) al-mal (hukum keuangan), (5) al-fiqh al-duwali (hukum internasional).

Dari sekian lapangan hukum yang dikenal dalam syari'at Islam, baru hukum privat khususnya hukum kekeluargaan yang menyangkut perkawinan, kewarisan, hibah, dan wasiat yang diakui sebagai hukum positif dalam sistem hukum nasional.

Namun dalam Islam tetap dimungkinkan mengembangkan konsep hukum publik alternatif yang dapat mengatasi kesulitan luar biasa. Konsep hukum publik alternatif ini bisa disebut "syari'ah modern". Artinya, ia sama-sama dijabarkan dari sumber-sumber asasi Islam⁶.

Salah satu kendala yang masih menyelimuti hukum pidana positif ialah perdebatan sengit tentang masa depan sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengikuti dua model. Disatu pihak unsur-unsur penduduk yang sekulermendesak dilanjutkan penerapan prinsip-prinsip barat. Umat Islam, Tradisionalis dan fundamentalis, dilain pihak, menuntut diterapkannya hukum pidana syari'ah dengan segera dan menyeluruh⁷.

3. VISI SYARI'AT ISLAM DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM

Terjadinya perbedaan persepsi (misunderstanding) yang tarik menarik antara unsur-unsur penduduk non Islam dengan penduduk Islam diatas – realitas penduduk Indonesia yang Plural – menjadikan sulitnya legislasi pidana . Oleh karena itu penting bahwa masing-masing pihak diberikan kebebasan berkumpulse penuh-penuhnya untuk besaing mendapatkan persetujuan publik atas posisinya, sebelum memperkenalkan perubahan drastis dalam legislasi pidana⁸. Jadi, alangkah baiknya hal itu ditinjau dari sisi obyektifitas hukum, terutama filsafat hukum untuk mempertimbangkan

⁶ Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, wacana Hak Asasi Manusia dan hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, 1994, hlm. 4

⁷ *ibid*, hlm 255

soal-soal lain yang lebih valid. Sehingga dapat dikorelasikan dengan fungsi hukum tersebut dalam masyarakat.

Permasalahan yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Teori-teori hukum menciptakan juga hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah⁹ :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi kaitannya (Hans Kelsen), atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia adalah ilmu (teori) hukum yang memiliki jiwa, nilai-nilai, perasaan dan pandangan hukum bangsa Indonesia¹⁰. Korelasi fungsional antara ketiga komponen di atas perlu ditata dan ditingkatkan secara stimulan, searah dan seimbang¹¹ sesuai dengan realitas dan cita-cita bangsa Indonesia.

Diantara ketiga komponen diatas yang paling memiliki andil paling besar adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi ; sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan

⁹ *Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto, dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 13

¹⁰ Dr. Lily Rosyidi, SH, LLM, dan B. Arief Soeharto, SH, Ed. *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosda karya Bandung, cet. II, 1994, hlm. 112

¹¹ Prof. Dr. Umar Syihab, *op. Cit.*

batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu¹².

Dengan mempertimbangkan beberapa potensi yang dimiliki syari'at Islam sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada sakahnya mengangkatnya dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, untuk mereformasi sistem hukum selama ini dan yang terpenting menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin.

Dari segi teori, reformasi hukum akan kurang berhasil apabila tidak berlangsung di dalam suasana sinergis. Artinya reformasi hukum membutuhkan dukungan dari lingkungan yang kondusif. Bidang-bidang didalam masyarakat terhubung dan tersusun secara struktural-sistemik¹³.

C. KESIMPULAN

Suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mempunyai hukum bagus. Artinya pergaulan dalam masyarakat ditur sedemikian rupa oleh hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, yaitu hukum yang memiliki struktu, kultur dan visi serta misi yang tidak bertentangan dengan masyarakat. Dalam konteks seperti itu, idealita hukum bangsa Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai, jiwa dan pandangan hukum bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga secara inconcreto supremasi hukum dapat dukung eksistensinya oleh aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kaitannya dengan itu, beberapa potensi syar'at Islam sebagaimana diulas diatas dapat ditransformasikan dalam tata hukum nasional yang lebih mantap.

¹² Jhon Z. Loudoe, SH, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, 1985, hlm. 162

¹³ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *op. Cit*, hlm. 208